BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah hukum untuk melihat posisi dan kontribusi penelitian terhadap perkembangan keilmuan yang telah ada. Bagian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tema-tema yang sudah pernah diteliti, tetapi juga menegaskan keunikan dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelusuran terhadap studi-studi sebelumnya diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak bersifat duplikatif, serta dapat memperkuat basis teoritis dan metodologis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum pernikahan dini.

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris. Namun demikian, setiap penelitian memiliki fokus wilayah, ruang lingkup peraturan, dan strategi metodologi yang berbeda. Penelitian ini mencoba memperlihatkan bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Indramayu dengan menghubungkannya secara langsung terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Adapun lima penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian oleh Annisa (2020) berjudul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014: Studi Kasus di KUA Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus”* menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menyoroti lemahnya ketentuan usia minimal perkawinan dalam UU Perlindungan Anak dan mengkaji bagaimana KUA setempat menanggapi praktik pernikahan dini melalui edukasi hukum terhadap masyarakat. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan empiris, fokus penelitian Annisa terletak pada ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji UU No. 16 Tahun 2019 yang telah memperbarui ketentuan usia minimal pernikahan (Annisa, 2020).

- b. Penelitian kedua disusun oleh Dila Nurfadila melalui skripsi berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta*", yang disusun pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan berfokus pada pelaksanaan norma hukum pasca amandemen UU Perkawinan. Temuannya menunjukkan bahwa pengetatan syarat dispensasi dan pembinaan oleh petugas KUA berdampak menurunnya angka pernikahan dini. Meski membahas UU yang sama, penelitian Dila lebih menyoroti aspek administratif dan efektivitas penerapan, sementara penelitian ini lebih menekankan peran preventif dan edukatif dari KUA dalam kerangka perlindungan hukum anak.
- c. Selanjutnya, penelitian oleh Wiwik Widyati berjudul "*Efektivitas Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2022*" yang merupakan skripsi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun 2023, menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menilai efektivitas bimbingan pranikah dan penyuluhan sebagai sarana utama dalam mencegah pernikahan dini. Keunggulan metodologis penelitian ini adalah penggunaan teknik validitas data berupa member check, yang memperkuat kualitas data empiris. Namun, fokus penelitian ini lebih deskriptif terhadap program-program internal KUA, tanpa mengelaborasi keterkaitannya secara mendalam dengan pembaruan norma hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.
- d. Penelitian keempat dilakukan oleh Ika Nur Aini melalui skripsi berjudul "*Peran Pegawai KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Meminimalisir Pernikahan Dini*" yang ditulis di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dan menyimpulkan bahwa pegawai KUA berperan penting dalam menurunkan angka pernikahan dini melalui kegiatan pembinaan masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan pengaruh nyata dari intervensi kelembagaan, namun belum secara eksplisit mengaitkan praktik tersebut dengan norma hukum tertulis. Penelitian ini menjadi pembanding penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh pelibatan langsung petugas lapangan.

- e. Terakhir, penelitian oleh Lathifah Nur Azizah berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Pernikahan Dini akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk*”, merupakan karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-yuridis dan menyoroti faktor eksternal berupa media sosial sebagai penyebab pernikahan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini tetap dapat dilegalkan melalui dispensasi, meskipun latar belakangnya bersifat sosiologis. Penelitian ini relevan untuk memperluas perspektif penyebab pernikahan dini, namun tidak membahas upaya pencegahan atau keterlibatan kelembagaan sebagaimana fokus utama penelitian ini.

Melalui kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tema pernikahan dini telah mendapat perhatian dari banyak kalangan akademik, baik melalui pendekatan hukum positif maupun studi empiris kelembagaan. Akan tetapi, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang khas dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris secara seimbang, serta berfokus pada institusi KUA di Kabupaten Indramayu dengan meninjau peranannya dalam kerangka Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pencegahan berbasis edukasi dan penyuluhan hukum, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

B. Tinjauan Yuridis tentang Upaya Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Indramayu

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai dan kekal. Perkawinan bagi semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral, harus dihormati, dan dijaga kelanggengannya. Dalam ketentuan pasal 28D Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi perkawinan:

a. Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

c. Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu, dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. (Tengku Erwinsyahbana 2022)

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang akan membentuk keluarga bahagia, dan juga perkawinan tidak dapat dilakukan apabila laki – laki dan perempuan belum mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Dalam fenomena ini banyak alasan dan penyebab yang memudahkan perkawinan dini dilakukan, banyak kasus pernikahan dini diberbagai daerah Indonesia yang melatar belakangi masalah ini adalah kesulitan ekonomi dan kehamilan di luar nikah sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Keberadaan Perundang – Undang di Indonesia sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan atau perkawinan anak dibawah umur.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan yaitu berdasarkan ketentuan Undang – Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa usia minimal yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi calon pengantin laki - laki maupun calon pengantin perempuan. Pertimbangan kedua calon mempelai tersebut dimaksudkan belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dalam membina sebuah rumah tangga.

2. Prinsip – Prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip-prinsip perkawinan yang menjadi pedoman penting, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan secara suka rela dari kedua belah pihak. Untuk memastikan hal ini, dilakukan proses peminangan terlebih dahulu guna mengetahui apakah kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, karena terdapat ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan yang harus dipatuhi, seperti hubungan darah atau larangan berdasarkan aturan agama.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang berkaitan dengan calon mempelai maupun pelaksanaan perkawinan itu sendiri. (Moch. Isnaeni, 2016)

Jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip Islam tersebut sejalan dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat asas-asas yang mengatur bahwa setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memiliki kematangan, baik secara fisik maupun mental. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Sukarela, Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
2. Asas kebebasan, setiap orang bebas untuk memilih pasangan, namun tetap memperhatikan larangan perkawinan.
3. Asas Poligami Dibatasi, Poligami hanya diizinkan dalam kondisi tertentu dan dengan pembatasan yang sangat ketat sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Asas Kematangan Calon Mempelai, Calon mempelai harus memiliki kematangan secara fisik dan mental untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
5. Asas Legalitas, Perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

6. Asas Selektivitas, Pemilihan pasangan hidup dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menjamin tujuan perkawinan tercapai. (H. Zaeni Asyhadie 2020)

Secara umum, asas-asas perkawinan dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan bergantung pada pemenuhan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.
3. Perkawinan menganut asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan secara fisik dan mental.
5. Perceraian diupayakan untuk dihindari sejauh mungkin.
6. Hak dan kedudukan suami istri harus seimbang dalam rumah tangga.

Usia perkawinan erat kaitannya dengan asas keempat, yaitu "calon suami istri harus matang jiwa dan raganya." Hal ini berarti calon mempelai harus memiliki kematangan usia, pola pikir, dan kemampuan bertindak yang bertanggung jawab. Kematangan ini penting untuk menciptakan tujuan perkawinan yang baik dan menghindari permasalahan yang dapat berujung pada perceraian.

3. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani yang mempunyai peranan yang penting.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sakinah mempunyai arti sebagai ketenangan. Sedangkan mawaddah yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu arti ini sebagai doa untuk selalu menjaga cinta dan kasihnya terhadap pasangan hingga akhir hayat. Dan rahmah mempunyai arti rezeki serta rahmat. Proses untuk keluarga yang diberikan rahmah oleh Allah tidaklah mudah karena proses ini pasangan saling pengertian sehingga apapun masalah keluarga akan dilalui bersama – sama. (J.M Henny Wiludjeng 2020)

Menurut Soemiyati menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, antara laki - laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan - ketentuan yang telah diatur. (Soemiyati 2007)

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu;

- a. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
- b. Terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinya.
- c. Terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantinya.

Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kobul

Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti kewajiban ada pada kedua calon mempelai baik laki – laki dan perempuan, wali, ijab – kobul serta dua orang saksi. (Hilman Hadikusuma, 2022)

5. Syarat Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat calon suami dan calon istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan. Dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya 16 tahun”. Dan pada ayat (2), “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang

diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam yang artinya selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Sebelum berlangsungnya Pernikahan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Adapun dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain.
- c. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing – masing.
- d. Perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

6. Dasar Hukum Perkawinan di Bawah Umur

Ketentuan hukum perkawinan diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat – syarat perkawinan, Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, damai, kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang menglasungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani calon suami dan calon istri, maka perlu ditetapkan batas – batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup”. Apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. (Sonny Dewi Judiasih 2018)

7. Faktor – faktor Perkawinan di Bawah Umur

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas – pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya. Kadang keputusan menikah muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda dan berharap dapat meringankan beban orang tuanya.

b. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor ini salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, karena pergaulan bebas yang menyebabkan banyaknya kasus hamil di luar nikah yang membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya. Kurangnya pengawasan dari orang tua akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan – aturan yang Allah tetapkan dalam etika pergaulan.

c. Faktor Pendidikan

Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Kurangnya pendidikan akan semakin mendorong berlangsungnya pernikahan dini. Bahwa faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab dari

maraknya pernikahan dini hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan terhadap seksualitas, mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks pra-nikah.

8. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan dini memberikan dampak yang tanpa kita sadari dampak tersebut akan terus – menerus membawa efek ke masa depan.

a. Dampak Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil. Anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak. Selain itu, pernikahan dini akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

b. Dampak Kesehatan

Dari sisi kesehatan, pasangan muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan ibu hamil dengan usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan, dan ketulian.

c. Dampak sosial

Fenomena sosial ini erat kaitannya dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang sering kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat, di mana perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap kebutuhan seksual laki-laki. Pandangan semacam ini bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam, yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan perempuan. Praktik tersebut justru melanggengkan budaya patriarki yang bias gender, yang berpotensi melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Perkawinan di bawah umur membawa dampak yang cenderung merugikan bagi pasangan yang menjalaninya. Dampak tersebut meliputi meningkatnya risiko pertengkaran, perselisihan, dan perkecokan dalam rumah tangga. Jika hal ini

terjadi secara terus-menerus, dapat berujung pada perceraian. Perceraian sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan masing-masing pasangan untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri secara optimal.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur menghasilkan dampak negatif. Ada sebagian pasangan yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perkawinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kematangan emosional, kesiapan mental, dan komitmen dari kedua belah pihak.

C. Kantor Urusan Agama

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Departemen agama yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang agama, KUA bertugas di tingkat Kecamatan, di bawah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota (KMA No. 517/2001). Oleh karenanya wajar bila keberadaan KUA sebagai unit terdepan karena secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Kabupaten dan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku.

a. Tugas Kantor Urusan Agama:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam wilayah Kecamatan
- 2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan
- 4) KUA juga berperan dalam kerukunan umat beragama, baik secara internal maupun eksternal.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama:

- 1) Fungsi Administrasi, Menyelenggarakan pengelolaan statistik dan dokumentasi, surat-menyurat, kearsipan, serta pengelolaan tata kelola rumah tangga pada Kantor Urusan Agama.
- 2) Fungsi pelayanan, Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, memberikan layanan terkait perwakafan, pengelolaan kemasjidan, zakat, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya.
- 3) Fungsi pembinaan, Melaksanakan pembinaan internal bagi karyawan Kantor Urusan Agama dan pembinaan eksternal terhadap lembaga-lembaga Islam di wilayah kecamatan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dipahami bahwa KUA tidak hanya menangani pernikahan tetapi juga menangani pembinaan lembaga Islam di wilayah Kecamatan.

D. Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Perundang – Undangan di Indonesia

1. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan penjelasan bahwa perkawinan yang dilakukan bukan hanya sekedar main – main, namun haruslah dilakukan sesuai dengan hukum dan agama serta harus dipertanggung jawabkan. Pernikahan anak dibawah umur atau dini apabila melihat dari ketentuan perundang – undangan yaitu Undang – Undang No. No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Penjelasan tersebut memberikan sebuah batasan mengenai usia atau umur calon mempelai. Ketentuan dalam Undang – Undang tersebut tentu bertentangan dengan

kasus pernikahan dini yang masih saja dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini, bahwa masyarakat tidak memperdulikan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat secara tidak langsung telah menimbulkan permasalahan baru, yaitu melanggar ketentuan Undang – Undang yang berlaku, kehilangan “masa remaja” secara tidak langsung bagi para pihak sehingga masa remaja akan hilang untuk mengurus dunia baru yaitu dunia keluarga yang membutuhkan tanggung jawab. Dari sisi kesehatan, pasangan muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.

Dampak yang terjadi pada pasangan muda yaitu rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Faktor utama penyebab pernikahan dini adalah akibat dari kecelakaan hamil diluar nikah dapat berdampak buruk bagi ibu hamil dan keluarganya. Secara hukum, pernikahan pada wanita di luar nikah tetap sah meski anak telah lahir. Pasal tersebut menegaskan bahwa pasangan yang menikah dalam kondisi hamil tidak perlu melakukan pernikahan ulang meskipun bayinya telah lahir.

2. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perkawinan di bawah umur dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini karena perkawinan di bawah umur dapat mengeksploitasi anak dan merenggut masa kanak-kanak mereka. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia dini seperti ini akan banyak menimbulkan dampak dan akibat tertentu yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan, seperti pertengkaran dalam rumah tangga. Kenyataan seperti ini apabila dilanjutkan bukannya akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah dan akan semakin

menjauh dari pernikahan yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di mana hak anak merupakan hak asasi manusia yang kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Lalu dilanjutkan dengan Pasal 53 (1) yang mengatakan bahwa sejak anak berada dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.

Pada Pasal 1 angka 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak-hak dari anak itu sendiri tidak hanya dapat kita lihat dalam peraturan yang memfokuskan pada perlindungan anak saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, melainkan pada peraturan lainnya. Anak yang masih dibawah dari pada usia yang seharusnya untuk dilakukan perkawinan masih rentan terhadap mentalnya.

3. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perbedaan batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Perkawinan serta Pasal 1 ayat (1) UUPA merugikan hak konstitusional. Pasal 7 ayat (2) UU perkawinan menyatakan, *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), otang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* Sedangkan, Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan, *“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”*

Sementara Pasal 1 ayat (1) UUPA menyatakan, “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*” menyebutkan perubahan batas usia minimal untuk perkawinan yang akhirnya setara antara laki-laki dan perempuan, termasuk dispensasi menikah untuk anak di bawah umur telah dijabarkan. Sehingga, secara yuridis laki-laki dan perempuan baru boleh diizinkan menikah apabila telah berumur 19 tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga yudisial dengan alasan yang kuat. Akan tetapi tidak menetapkan makna dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Sementara pada UUPA, ketentuan seseorang dikatakan dewasa setelah berusia 18 tahun. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sinkronisasi tentang batas usia.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Batas usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat (1) yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya 16 tahun”. Dan pada ayat (2), “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dengan rumusan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga para remaja pun yang belum mencapai usia dewasa dapat melakukan kesiapan-kesiapan yang lebih matang dalam hidupnya yaitu dapat melakukan aktivitas belajar dan bekerja serta berpesta dengan tetap menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan adanya batas usia yang jelas tersebut masa kecerdasan sebagai anak-anak tidak menjadi terampas dengan beban tanggung jawab yang harus diembannya karena telah berubah statusnya sebagai suami atau istri dalam usia yang masih dini.